



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

LKjIP DINAS SOSIAL

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Selain memenuhi kewajiban formal sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Secara garis besar, laporan ini menyajikan data capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mengoptimalkan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik jajaran internal, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas.

Kami berharap LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja Dinas Sosial, sekaligus menjadi bahan masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang demi kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow yang lebih sejahtera

Lolak, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



ERNIE CH. MOKOGINTA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661105199403 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow	1
B. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
C. Indikator Kinerja Utama	8
D. Rencana Kinerja Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	32
A. Tinjauan Umum	32
B. Permasalahan dan Strategi Pemecahan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Sosial Adalah Tipe A yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Adapun struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

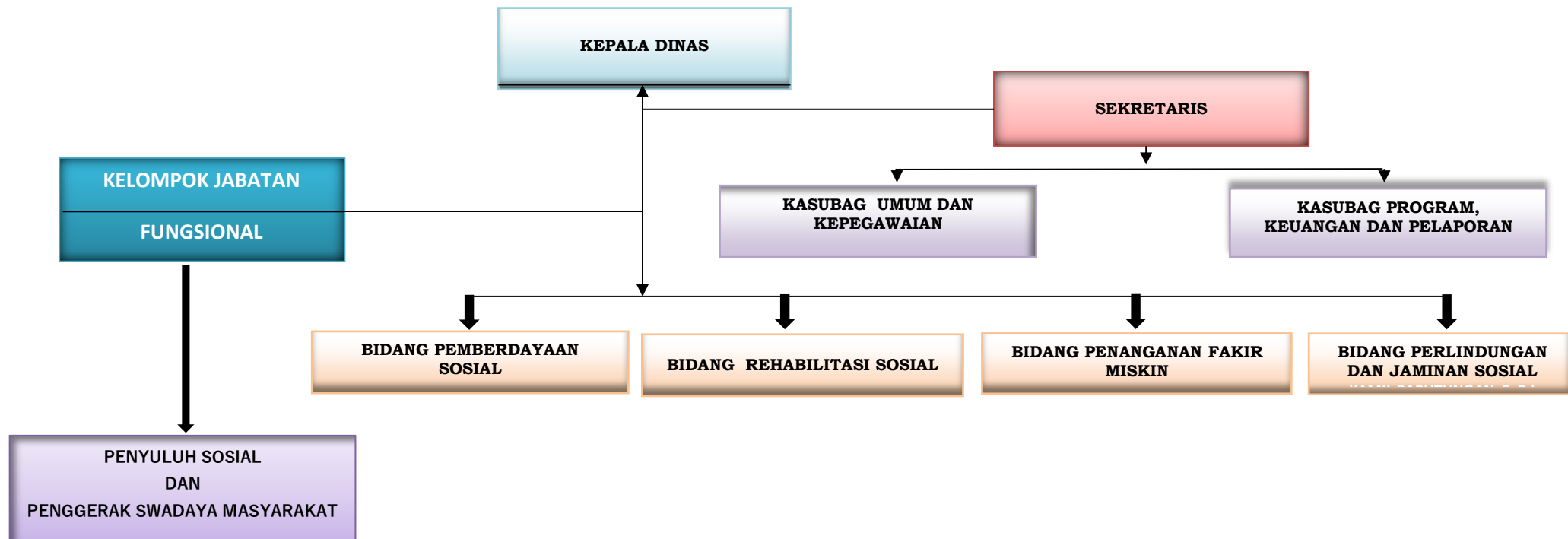
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Membawahi :
 - a. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Pemberdayan Pengembangan PSKS
 - b. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Jaminan Sosial
5. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Pengerak Swadaya Masyarakat/Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pendampingan Fakir Miskin
 - b. Pengerak Swadaya Masyarakat / Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Membawahi :
 - a. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan
 - b. Penyuluh Sosial / Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan LANSIA

Untuk lebih jelasnya Struktur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe A, dapat dilihat pada Bagan Berikut :

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



B. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PMKS belum maksimal dikarenakan minimnya SDM yang ada serta kurangnya kesadaran masyarakat akan data kependudukan yang mengakibatkan ketidakvalidan yang sudah diprogramkan dan diharapkan yang mengakibatkan Bantuan tidak dapat tersalur.
2. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya
3. PMKS masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pelayanan sosial dasar, penyandang cacat masih menghadapi kendala dalam hal kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka, dan keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan.

4. Permasalahan kesejahteraan sosial ke depan masih didominasi oleh kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana. Namun demikian, permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan.
5. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Sosial sementara dengan adanya RTLH salah satu syarat untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.
6. Belum terkoordinir dengan baik bantuan – bantuan yang diberikan kepada PMKS karena masih minimnya anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

- *Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow*

Untuk mendukung Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan Visi :

“Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow maka dirumuskan melalui 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan.
2. Mewujudkan Pemerataan Pelayanan Sosial Melalui Penguatan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar Mandiri dan Produktif.
4. Mengoptimalkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Bencana dan Masalah Sosial
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Dinas Sosial yang Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow maka ditetapkan 1 Tujuan yaitu : **Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia**

Dari Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow diatas mempunyai Sasaran :

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS.

Dari Sasaran diatas memiliki Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan PMKS
2. Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif.

TABEL 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan manusia	Menurunkan Angka Kemiskinan	2%	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase Penurunan PMKS	2	2	2	2
			90%	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif	90	93	96	98

B. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2023 - 2026.

Maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

TABEL 2.2
Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase Penurunan PMKS	2%	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 291.690.888,-
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 207.568.065,-
				Program Penanganan Bencana	Rp 319.675.974,-
		Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif	96%	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 346.273.505,-

Gambaran secara utuh sebagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRETEGIS	FORMULA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase Penurunan PMKS	PMKS = $\frac{\text{Jumlah PMKS yg tertangani}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100$	2%
		Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif	PSKS = $\frac{\text{Jumlah PSKS aktif}}{\text{Jumlah Total PSKS}} \times 100$	96%

D. Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama maka di tetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS	Persentase Penurunan PMKS	2%
		Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif	96%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) .

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85	= Sangat berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Kategori Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai } \textit{mean} \text{ setiap}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil*, *berhasil*, *cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN



Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran : Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS



Pengukuran capaian kinerja sasaran : **“Menurunnya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial PMKS”** memiliki 2 Indikator sasaran yaitu :

1. Persentase Penurunan PMKS Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{PMKS} = \frac{\text{Jumlah PMKS Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$$

$$\text{PMKS} = \frac{4.827}{125.828 \text{ Jiwa}} \times 100$$

$$\text{PMKS} = 3.84 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penurunan PMKS sebesar 4.827 Jiwa atau sebesar 3.84 %. Dari hasil pencapaian pada tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk indikator ini sebesar 2% maka dapat disimpulkan untuk pencapaiannya adalah **Sangat Berhasil**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun Target dan Realisasi untuk Tahun 2025 capaian Indikator presentase penurunan PMKS dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

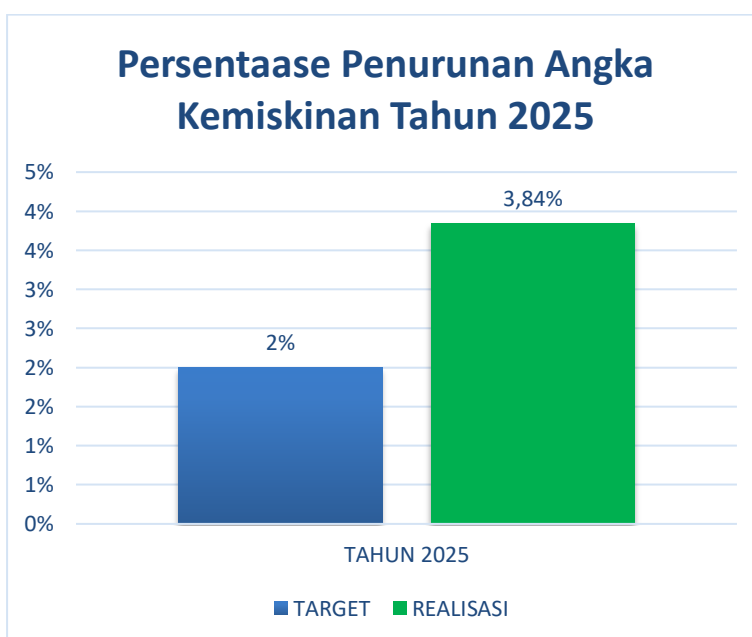
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan PMKS	2%	3.84%	192%

Berdasarkan Tabel 3.1 Diatas terlihat bahwa di tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai target yang ditetapkan sebanyak 2%, sesuai data yang ada indicator Persentase Penurunan Angka Kemiskinan dari target 2% terealisasi 192% dengan capaian realisasi kinerja 3,84%. Dapat juga kita lihat pada capaian grafik berikut :

Grafik 3.1

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025



Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.

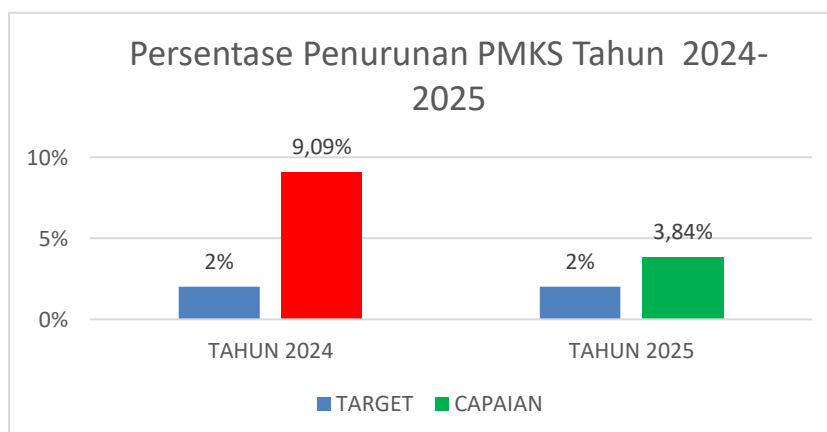
Adapun Perbandingan capaian Indikator presentase penurunan angka kemiskinan tahun 2024 dan 2025, dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 3.2
ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
“MENURUNNYA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Indikator	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase Penurunan PMKS	2%	9,09%	454,5%	2%	3,84%	192%	2%
Rata-Rata Capaian		454,5%			192%			

Berdasarkan Tabel 3.2 Diatas terlihat Capaian indikator Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2025 dari Target 2% terealisasi 3,84% dengan Capaian Kinerjanya sebesar 192% dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 Target 2% terealisasi 9,09% dengan capaian kinerja 454,5%. hal ini terjadi karena adanya penambahan petugas Pelayanan serta pembentukan Operator DTKS di setiap desa/kelurahan. Dapat juga kita lihat pada capaian grafik berikut

Grafik 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025



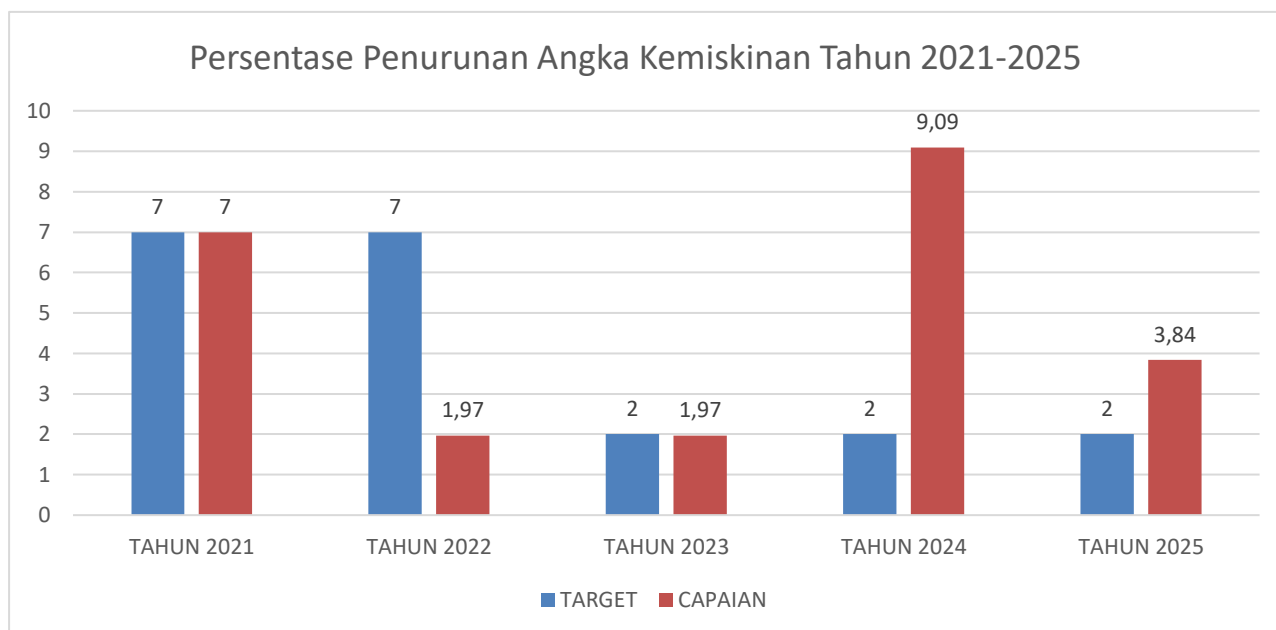
2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Adapun Perbandingan capaian Indikator presentase penurunan angka kemiskinan Tahun 2019-2025, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS

Indikator Kinerja	Capaian Tahun						Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Persentase Penurunan PMKS	1.66	7.07	7	1,97	1,97	9,09	2	3.84	192	2	3,84

Capaian indikator Persentase Penurunan PMKS Tahun 2019-2024 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2019 sebesar 1,66%, Capaian Tahun 2020 sebesar 7,07, Capaian Tahun 2021 sebesar 7, Capaian Tahun 2022 sebesar 1,97, Capaian Tahun 2023 sebesar 1,97, Capaian Tahun 2024 sebesar 9.09 sedangkan untuk Tahun 2025 terealisasi sebanyak 3,84% dari target 2%. Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa Persentase Penurunan Angka Kemiskinan dari Tahun 2019-2025 tidak Stabil hal ini terjadi karena di Tahun 2020 tidak tersedianya Anggaran untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Data sehingga data yang didapat hanyalah sebatas data yang diberikan oleh Pekerja Sosial terkait masyarakat penerima yang sudah meninggal ataupun pindah tempat tinggal.

Grafik 3.3**Membandingkan Realsasi Kinerja 5 Tahun****3. Membandingkan Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

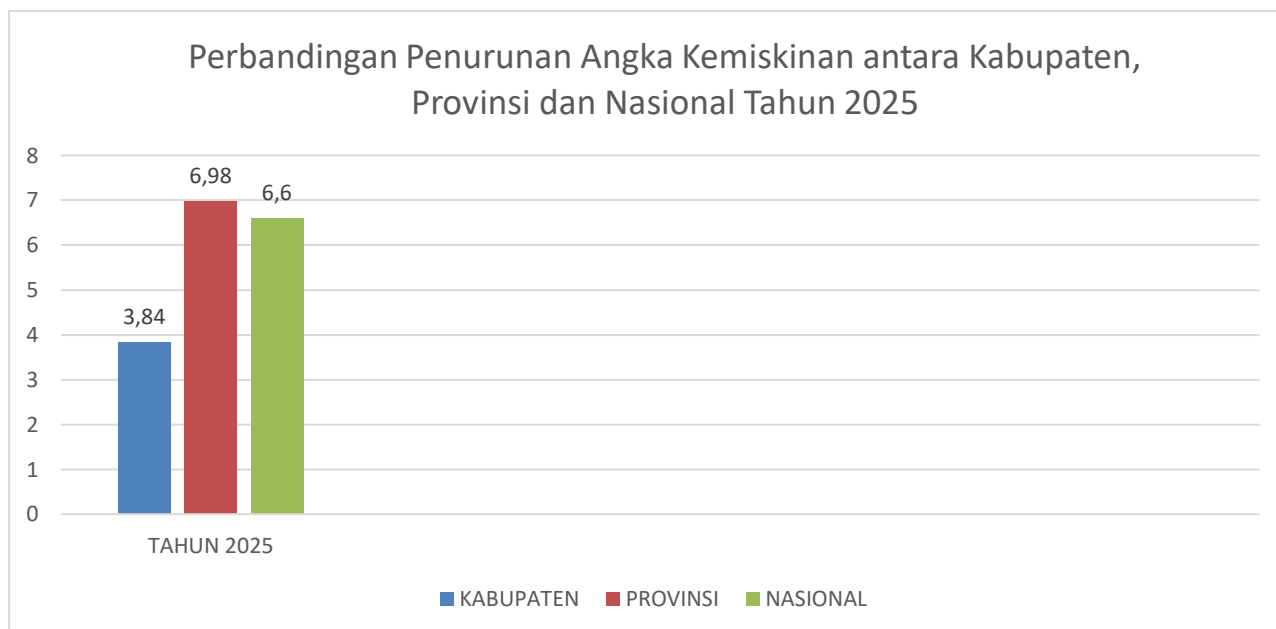
Adapun Perbandingan capaian Indikator presentase penurunan angka kemiskinan Tahun 2025 dengan target kabupaten, provinsi dan nasional, dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 3.4**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS**

NO	INDIKATOR	KABUPATEN	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan PMKS	3,84 (6,98)	7,38	6,60

Capaian indikator Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2025 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow 3,84 (Menurut Statistik 2024 sebesar 7,74 dan ditahun 2025, 6,98) Provinsi 7,38 dan Nasional 6,60 hal ini Dapat juga kita lihat pada capaian grafik berikut

Grafik 3.4
Membandingkan antara Capaian Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Tahun 2025



4. Aalisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dapat Dilihat dari Tabel 3.1 diatas bahwa pada Tahun 2025 Capaian Kinerja Persentase Penurunan PMKS ditahun 2025 sebanyak 3.84% dari Target 2 %. Dibandingkan dengan Tahun 2024 ada peningkatan Capaian Kinerja sebesar 9,09% dari Target 2%. Hal ini di karenakan dari data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 4.827 jiwa dari Total PMKS sebanyak 125.828 Jiwa. untuk capaian Kinerja Mencapai Target ini disebabkan karena

1. Adanya Penambahan Operator Siks-Ng di Di Dinas dan Pembentukan Operator Siks-Ng di Setiap Desa
2. Kesadaran Masyarakat dalam Perbaikan Data.

Adapun Tindakan lanjutan yang Dinas sosial Lakukan adalah melakukan Bimtek bagi Operator Desa sebagai Langkah pemantapan Pengoperasian Aplikasi Siks-Ng.

Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori **“SANGAT BERHASIL”**

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi atas Indikator Penurunan Angka Kemiskinan ini terealisasi sangat minim hal ini terjadi karena Dinas Sosial untuk Tahun 2025 terkait dengan data berkiblat pada Aplikasi Siks-NG dimana data yang ada didalam Sebagian telah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik hal ini terjadi karena dengan adanya Penambahan Operator di Dinas maupun Pembentukan Operator Desa diantaranya :

1. Penambahan Operator Siks-Ng (ASN) di Dinas Sosial (11 Orang)
2. Penambahan Operator Desa di setiap Desa / Kelurahan. (202 Operator),

6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator sasaran ini adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

3. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota.

2. Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{PSKS} = \frac{\text{Jumlah PSKS Aktif}}{\text{Jumlah TOTAL PSKS}} \times 100$$

$$\text{PSKS} = \frac{297}{395} \times 100$$

$$\text{PSKS} = 75,19\%$$

$$\text{PSKS} = 75,19\%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif sebesar 297 PSKS atau sebesar 75,19%

7. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun Target dan Realisasi untuk Tahun 2025 capaian Indikator presentase PSKS yang berpartisipasi aktif dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif	96%	75.19	78.32

Berdasarkan Tabel 3.1 Diatas terlihat bahwa di tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 96%, sesuai data yang ada indicator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif dari target 96% terealisasi 75.19% dengan capaian realisasi kinerja 78.32%. Dapat juga kita lihat pada capaian grafik berikut :

Grafik 3.5**Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025**

8. Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.

Adapun Perbandingan capaian Indikator Presentase PSKS yang berpartisipasi Aktif tahun 2024 dan 2025, dapat kita lihat pada tabel berikut

Tabel 3.6
ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2
“PERSENTASE PSKS YANG BERPARTISIPASI AKTIF”

No	Indikator	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Persentase PSKS yang berpartisipasi Aktif	93%	46.84	50.36	96%	75.19	78,32	98%
Rata-Rata Capaian		50.36			78.32			

Berdasarkan Tabel 3.6 Diatas terlihat Capaian indikator Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif Tahun 2025 dari Target 96% terealisasi 75,19% dengan

Capaian Kinerjanya sebesar 78.32% dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 Target 93% terealisasi 46.84% dengan capaian kinerja 50.36%.

Dapat juga kita lihat pada capaian grafik berikut

Grafik 3.6

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025



9. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Adapun Perbandingan capaian Indikator presentase penurunan angka kemiskinan Tahun 2019-2025, dapat kita lihat pada tabel berikut :

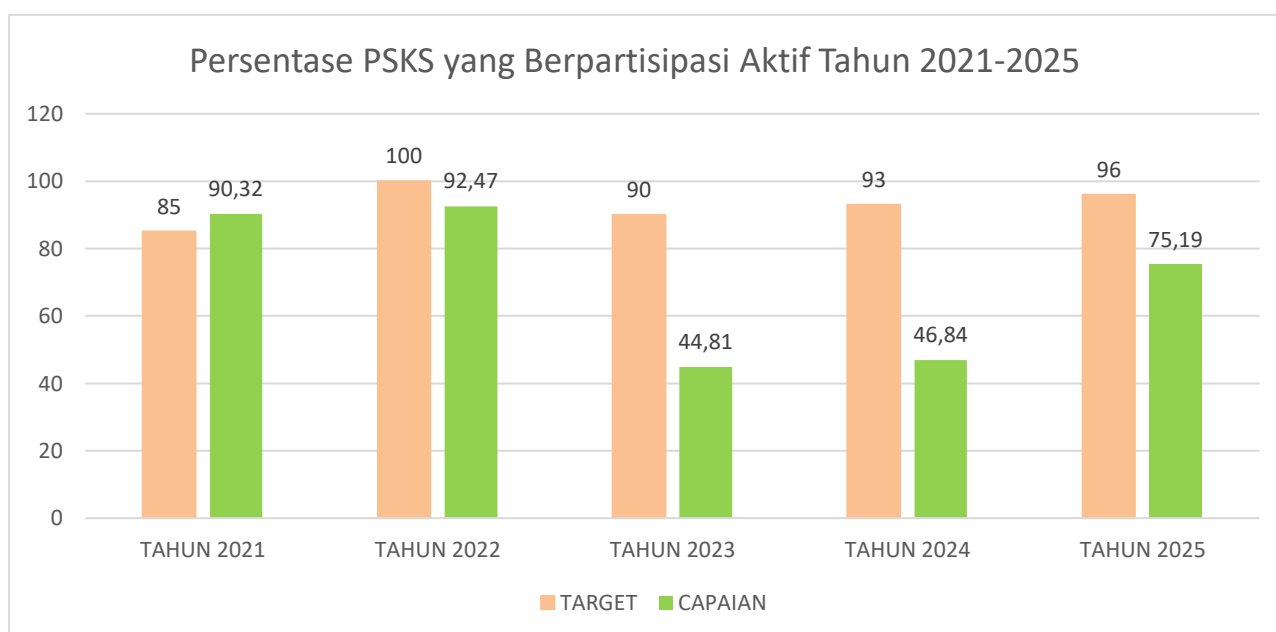
Tabel 3.7
Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif

Indikator Kinerja	Capaian Tahun						Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
Persentase PSKS yang berpartisipasi Aktif	52,69	77,41	90,32	92,47	44,81	46,84	96	75,19	78,32	98	

Capaian indikator Persentase PSKS yang berpartisipasi Aktif Tahun 2019-2024 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2019 sebesar 52,69%, Capaian Tahun 2020 sebesar 77,41, Capaian Tahun 2021 sebesar 90,32%, Capaian Tahun 2022 sebesar 92,47, Capaian Tahun 2023 sebesar 44,81% dan untuk Capaian Tahun 2024 sebesar 46,84%, Capaian Tahun 2025 sebesar 75.19% berdasarkan Hasil diatas dapat diketahui bahwa Persentase PSKS yang berpartisipasi Aktif Tahun 2019-2024 mengalami peningkatan.

Grafik 3.7

Membandingkan Realsasi Kinerja 5 Tahun



1. Aalisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dapat Dilihat dari Grafik diatas bahwa pada Tahun 2025 ada Peningkatan Capaian Kinerja Persentase PSKS yang berpartisipasi Aktif tahun 2025 sebanyak 75,19% dari Target 96 %. Dibandingkan dengan Tahun 2024 Capaian Kinerja sebesar 46,84% dari Target 93%. Hal ini di karenakan Hal - hal yang mempengaruhi dari meningkatnya Organisasi – Organisasi Sosial yang ada dikarenakan peran serta Pemerintah Desa sudah mulai ada untuk mengoptimalkan peran dari Organisasi – Organisasi Sosial diwilayah mereka untuk lebih berani mengepresikan diri untuk menjadi motor penggerak Lembaga namun kurangnya / minimnya dana pembinaan yang ada di Dinas

Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga Jumlah PSKS yang bertambah hanya sebanyak 112 Organisasi dari jumlah total PSKS (395). untuk capaian Kinerja Tidak Mencapai Target Kegagalan ini disebabkan karena

1. Kurangnya SDM yang ada.
2. Tidak adanya Dana untuk melakukan Pembinaan.

Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori **“CUKUP BERHASIL”**

2. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi atas Indikator Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif ini terealisasi sangat minim hal ini terjadi karena Dinas Sosial untuk Tahun 2025 tidak adanya dana pengembangan dan tidak dilakukan Verifikasi Kembali terhadap seluruh PSKS yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. hal ini terjadi diantaranya :

1. Belum diverifikasi Kembali seluruh PSKS yang ada.
2. Tidak adanya dana Pengembangan,
3. Minimnya SDM.

3. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator sasaran ini adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial.

- Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

a. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Sosial Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.556.929.247,- turun Rp. 5.220.503.043,- Turun (0.87)% dibanding anggaran yang dikelola Dinas Sosial tahun 2024,-

Realisasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2024 4.342.901.866 mencapai 94.89%. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yakni 95.30%.

Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah :

TABEL 3.9
Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jenis Belanja	2024			2025		
	Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Tidak Langsung						
Belanja Langsung	5.220.503.043,-	4.953.583.825,-	94,89	4.556.929.247,-	4.342.901.866,-	95,30
Jumlah	5.220.503.043,-	4.953.583.825,-	94,89	4.556.929.247,-	4.342.901.866,-	95,30

1. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing – masing Program / kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.10 di bawah:

Tabel 3.10
Realisasi Kegiatan Tahun 2025

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah		
		Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Dinas Sosial	4.556.929.247,00	4.342.901.866,00	95,30
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.391.720.815,00	3.235.902.883,00	95,41
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.065.776,00	50.410.085,00	98,72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.065.776,00	50.410.085,00	98,72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.423.917.524,00	2.311.100.801,00	95,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.380.903.457,00	2.272.345.586,00	95,44
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.637.335,00	35.526.335,00	89,63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.376.732,00	3.228.880,00	95,62
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.259.200,00	25.855.200,00	98,46
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.259.200,00	25.855.200,00	98,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.860.393,00	311.614.740,00	98,66
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.854.143,00	2.507.490,00	87,85
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.078.250,00	5.078.250,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	16.650.000,00	12.765.000,00	76,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.070.000,00	12.056.000,00	99,88
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.208.000,00	279.208.000,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.418.084,00	163.568.490,00	85,45
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.418.084,00	163.568.490,00	85,45

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.775.000,00	112.477.500,00	99,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.775.000,00	11.477.500,00	97,47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.424.838,00	260.876.067,00	96,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.972.036,00	63.687.017,00	88,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.007.992,00	8.164.050,00	90,63
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.444.810,00	189.025.000,00	99,78
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	346.273.505,00	307.864.438,00	88,91
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.134.154,00	6.005.505,00	97,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6.134.154,00	6.005.505,00	97,90
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	340.139.351,00	301.858.933,00	88,75
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	81.761.203,00	76.761.192,00	93,88
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	79.800.000,00	48.550.000,00	60,84
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	178.578.148,00	176.547.741,00	98,86
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	291.690.888,00	289.395.016,00	99,21
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	43.715.826,00	42.384.080,00	96,95
	Penyediaan Permakanan	9.961.476,00	9.415.610,00	94,52
	Penyediaan Sandang	4.665.000,00	4.031.745,00	86,43
	Penyediaan Alat Bantu	29.089.350,00	28.936.725,00	99,48
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	247.975.062,00	247.010.936,00	99,61
	Penyediaan Permakanan	190.541.406,00	190.012.995,00	99,72
	Penyediaan Sandang	31.880.106,00	31.566.600,00	99,02
	Penyediaan Alat Bantu	25.553.550,00	25.431.341,00	99,52

4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	207.568.065,00	201.055.768,00	96,86
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	207.568.065,00	201.055.768,00	96,86
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135.214.429,00	132.036.706,00	97,65
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.353.636,00	69.019.062,00	95,39
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	319.675.974,00	308.683.761,00	96,56
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	228.367.950,00	219.379.261,00	96,06
	Penyediaan Makanan	70.270.362,00	69.213.511,00	98,50
	Penyediaan Sandang	123.982.560,00	123.864.900,00	99,91
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	21.217.128,00	21.050.850,00	99,22
	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.897.900,00	5.250.000,00	40,70
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	91.308.024,00	89.304.500,00	97,81
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	91.308.024,00	89.304.500,00	97,81
	Jumlah	4.556.929.247,00	4.342.901.866,00	95,30

Pada Program Pemberdayaan Sosial dan Program Penanganan Bencana terdapat kegiatan yang mempengaruhi capaian realisasi kinerja keuangan yaitu :

- Kegiatan dengan anggaran Rp. 2.223.429 (**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 79,800,000,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 48.550.000 atau 60.84%

Minimnya serapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan :

- Untuk Belanja Honorarium Penyuluhan / Pendampingan tidak dicairkan karena Pendamping PKH telah terangkat menjadi P3K Kementerian Sosial RI
- Kegiatan **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten/Kota** pada Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan anggaran Rp. 12.897.900 (Dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 5.250.000 atau 40,70%

Minimnya serapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan :

- *Anggaran Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial ini tidak direalisasi dikarenakan permakanaan untuk kegiatan tersebut telah ditangani oleh Dinas BPBD melalui BTT (Belanja Tidak Terduga).*

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggung jawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS dengan Indikator Persentase Penurunan PMKS yang memiliki target 2% mendapat Realisasi sebesar 3,84% sehingga capaian kinerja sasaran ialah **“SANGAT BERHASIL”** .sedangkan Indikator Sasaran Persentase PSKS yang Berpartisipasi Aktif dengan Target 96% mendapatkan realisasi sebesar 75.19 sehingga capaian kinerja adalah **“CUKUP BERHASIL”**

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

"Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **“BERHASIL”**, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian PMKS yang tertangani dalam hal ini Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum semuanya memenuhi harapan. Hal ini terjadi karena :

1. Validasi dan Pemutakhiran Data (DTKS)

Masalah : Masih adanya data "anomali" atau ketidaktepatan sasaran (exclusion/inclusion error) di mana warga yang mampu terdata, sementara yang sangat miskin justru tercecer.

- Strategi: Penguatan sistem verifikasi berbasis komunitas dan digitalisasi pelaporan dari tingkat desa.
- Langkah-langkah:

1. Reaktivasi Musyawarah Desa (Musdes): Mewajibkan pemutakhiran data setiap tiga bulan melalui forum desa yang transparan.
 2. Integrasi SIKS-NG: Memperkuat kapasitas operator di tingkat kecamatan/desa agar penginputan data ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) lebih akurat dan tepat waktu.
 3. Audit Lapangan Sampling: Melakukan uji petik secara berkala untuk memastikan data di komputer sesuai dengan kondisi riil di rumah warga.
2. Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil
- Masalah : Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang besar membuat warga di pelosok sulit mengakses layanan bantuan sosial atau pengurusan administrasi kemiskinan.
- Strategi: Jemput bola (*Outreach*) dan desentralisasi layanan.
 - Langkah-langkah:
 1. Penguatan Pilar-Pilar Sosial: Memberdayakan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Pendamping PKH sebagai "perpanjangan tangan" resmi Dinas untuk menyelesaikan masalah di tempat.
 2. Layanan Pengaduan Berbasis WhatsApp: Membuka kanal aduan cepat agar warga tidak perlu datang jauh-jauh hanya untuk menanyakan status bantuan.
3. Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat
- Masalah : Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan tunai (bansos) tanpa adanya peningkatan taraf hidup yang signifikan (graduasi mandiri).
- Strategi: Transformasi dari bantuan konsumtif ke bantuan produktif.
 - Langkah-langkah:
 1. Pelatihan Skill & Sertifikasi: Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan

pertukangan, menjahit, atau UMKM digital bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Inkubasi Bisnis Lokal: Menghubungkan produk KPM dengan pasar lokal atau koperasi daerah agar ada keberlanjutan pendapatan.

4. Penanganan Masalah Sosial Kontemporer

Masalah : Meningkatnya isu-isu seperti kekerasan terhadap anak/perempuan, disabilitas yang belum terlayani maksimal, dan dampak bencana alam.

- Strategi: Kolaborasi lintas sektor dan penguatan infrastruktur sosial.
- Langkah-langkah:
 1. Unit Reaksi Cepat (URC): Membentuk tim yang siap siaga 24 jam untuk menangani laporan kedaruratan sosial (seperti orang telantar atau korban kekerasan).
 2. Pembangunan Database Disabilitas: Memetakan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas (alat bantu, aksesibilitas) agar bantuan tepat guna.
 3. Logistik Bencana: Memastikan stok di lumbung sosial (*social stock*) selalu tersedia di titik-titik rawan bencana di Bolmong.

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Perubahan Dinas Sosial tahun 2023-2026.

Lolak, Januari 2026

KEPALA DINAS,



ERNIE CH MOKOGINTA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661105 199403 2 009